

**Determinan Efektivitas Belanja Daerah dan Dampaknya  
Pada Pertumbuhan Ekonomi**

*Determinants of Regional Expenditure Effectiveness  
and Its Impact on Economic Growth*

**Marsela Wijayanti<sup>1</sup>**

[Marchella.w19@gmail.com](mailto:Marchella.w19@gmail.com)

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta*

**Natalia Lily Babulu<sup>2</sup>**

[natalialilly4@gmail.com](mailto:natalialilly4@gmail.com)

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor*

**Abstract**

*Increasing local budgets every year should be offset by increasing economic growth, but in fact economic growth has decreased from 2012 to 2015. This study aims to determine the effect of priority, the accuracy of allocation, timeliness, transparency and accountability to the effectiveness of regional expenditure and its impact on economic growth. The sample of this research is all districts and cities in Indonesia. Sources of data used are secondary data from budget reports and realized APBD obtained from the Directorate General of Fiscal Balance Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, performance evaluation report of local government implementation (EKPPD) obtained from the Directorate General of Regional Autonomy of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia and data of gross regional domestic product (GRDP) obtained from Indonesian Central Bureau of Statistics. The data used are from 2012 to 2015. Data analysis technique used is Partial Least Square (PLS). The result of the research shows that the priority has influence to the effectiveness of regional expenditure, the accuracy of allocation has no effect on the effectiveness of regional expenditure, the timeliness effect on the effectiveness of regional expenditure, transparency and accountability affect the effectiveness of regional expenditure and effectiveness affect the economic growth.*

**Keywords:** *Priority, Appropriateness of Allocation, Timeliness, Transparency and Accountability, Economic Growth.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prioritas, ketepatan alokasi, ketepatan waktu dan transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas belanja daerah serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sampel penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kotan di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan anggaran dan realisasi APBD yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, laporan evaluasi kinerja pelaksanaan pemerintah daerah (EKPPD) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan data produk domestik regional bruto (PDRB) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan adalah data dari tahun 2012 sampai dengan 2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah, ketepatan alokasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah, ketepatan waktu berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah dan efektivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Kata kunci :** *Prioritas, Ketepatan Alokasi, Ketepatan Waktu, Transparansi dan Akuntabilitas, Pertumbuhan Ekonomi.*

**Pendahuluan**

Otonomi daerah di Indonesia mulai di berlakukan pada tahun 1999 melalui UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan seiring berjalannya waktu UU tersebut dianggap

tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga mengalami perubahan menjadi UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2014 UU nomor 32 Tahun 2004 mengalami revisi menjadi UU nomor 23 Tahun 2014.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah maka setiap daerah dapat berfokus dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah dapat dilakukan pengembangan yang disesuaikan dengan pemerintah daerah setempat, kebutuhan, potensi dan kekhasan dari daerah tersebut. Sehingga setiap daerah dapat membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangannya yang menjadi hak setiap daerah. Pemerintah daerah juga bebas berkreasi untuk mengembangkan daerahnya selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Maju atau tidaknya suatu daerah ditentukan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri dalam melaksanakan pembangunan.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut maka dana pemerintah yang semula dikelola oleh pemerintah pusat menjadi wewenang pemerintah pusat menjadi wewenang pemerintah daerah melalui skema dana transfer atau disebut dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dengan otonomi daerah ini tidak dapat dipisahkan. Mereka seperti dua sisi mata uang yang berbeda namun saling melengkapi.

Desentralisasi fiskal yang efektif membutuhkan otoritas yang dimiliki semua tingkat pemerintah untuk membuat keputusan mengenai pengeluaran dan pendapatan yang mencukupi juga meningkatkan kemampuan daerah atau penyerapan dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut. Mengikuti tema literatur desentralisasi fiskal yang menyebutkan "*money follows function*" (Herwastoeti, 2010).

Prinsip *money follows function* menegaskan bahwa pengalokasian anggaran harus berdasarkan fungsi masing-masing unit dalam organisasi pemerintah. Prinsip ini mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan atau pendapatan (*revenue assignment*). Dengan kata lain, penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Secara filosofi maksud dari konsep ini adalah ingin membangun konsep penganggaran yang efektif, efisien dan menjaga kesinambungan fiskal melalui upaya peningkatan kualitas belanja (*quality spending*), yang dimulai dari pelaksanaan program atau kegiatan oleh fungsi organisasi yang tepat.

Pengaruh desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih besar melalui sisi pengeluaran dibandingkan sisi penerimaan daerah. Hal ini disebabkan karena sejak memasuki pelaksanaan era desentralisasi, segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dan tanggung jawab dalam penyediaan pelayanan publik dari pusat kewenangannya sudah dilimpahkan ke daerah sehingga, kondisi ini dapat mengakibatkan peningkatan alokasi dana belanja daerah yang jauh lebih besar, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Dengan demikian adanya peningkatan alokasi dana belanja daerah yang lebih besar berdampak positif terhadap peran Pemerintah Daerah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sisi pengeluaran (Kharisma, 2013:109).

Dari sisi pengeluaran, total belanja daerah dari tahun 2001 hingga tahun 2011 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Secara total belanja daerah mengalami pertumbuhan sebesar 430% dalam kurun waktu tersebut. Sementara itu belanja rutin tumbuh 313,8% sedangkan belanja modal atau pembangunan tumbuh sebesar 263% pada periode yang sama. Dari komposisi belanja daerah secara proporsional ternyata pengeluaran pemerintah daerah sebagian besar digunakan untuk pengeluaran rutin yang mencapai rata-rata 59%, bahkan proporsinya terus bertambah seiring berjalannya waktu. Sementara itu, untuk

pengeluaran pembangunan *share*-nya rata-rata mencapai 41% (Nurhemi dan Suryani, 2015:185). Oleh karena itu, analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*). Selain itu juga bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran (Makka, et all, 2015:329).

Belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut, khususnya belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan ketiga belanja tersebut mempunyai peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah yaitu dalam peningkatan kinerja pegawai pemerintah daerah dan penyediaan barang dan jasa. Belanja barang dan jasa yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur publik, seperti jalan raya dan fasilitas publik lainnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Pratolo dan Yudha, 2012:147).

Belanja daerah dalam APBD merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan semakin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Namun pada kenyataannya, masih banyak daerah yang belum sepenuhnya menyerap anggaran belanja daerah. Kurangnya daerah dalam menyerap anggaran mengindikasikan belum efektifnya belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah khususnya untuk belanja pembangunan.

Dimana efektivitas menurut Mardiasmo (2009:132) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Sedangkan menurut Ihyaul (2009:26) efektivitas merupakan hubungan antar keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran atau *ouput* program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output pada pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kesuksesan atau kegagalan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Realisasi anggaran yang masih kurang dari anggaran yang ditetapkan menggambarkan masih belum efektifnya pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran. Padahal anggaran belanja semakin meningkat setiap tahunnya dari tahun 2009 hingga tahun 2015 mengalami kenaikan. Tetapi, peningkatan anggaran setiap tahunnya tersebut belum digunakan secara maksimal. Belum efektifnya penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk belanja daerah tidak hanya ditentukan oleh belum terserapnya secara maksimal anggaran yang ditetapkan, namun kita juga harus melihat faktor lain yang menyebabkan pemerintah daerah belum secara maksimal menggunakan anggaran.

Data dari Kementerian Keuangan RI juga menyebutkan bahwa realisasi anggaran belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja tidak langsung. Setiap tahunnya belanja tidak langsung selalu lebih besar dari pada belanja langsung. Seperti yang diketahui bahwa belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan program kegiatan pembangunan pemerintah daerah.

Belanja langsung yang merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal seharusnya bisa lebih

besar dari pada belanja tidak langsung. Karena belanja tidak langsung sendiri merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Contoh belanja tidak langsung ini seperti belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja tidak rutin ini seharusnya dapat ditekan anggarannya, sehingga pemerintah bisa lebih berfokus terhadap belanja langsung guna menyediakan barang dan jasa, serta infrastruktur melalui belanja modal untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Seperti yang telah disebutkan bahwa belanja langsung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena berkaitan dengan penyediaan infrastruktur untuk pelayanan kepada masyarakat. Belanja langsung yang realisasinya masih di bawah belanja tidak langsung mengindikasikan belum efektifnya belanja pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk kegiatan belanja langsung. Pada Gambar 1.3 terlihat bahwa realisasi belanja langsung masih belum maksimal. Tahun 2009 realisasi belanja langsung sebesar 84,59%, pada tahun 2010 sebesar 87,39% dan pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 berturut-turut sebesar 90,60% , 87,86%, 87,59%, 81,29%, dan 86,20%. Rata-rata realisasi belanja langsung pemerintah daerah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 sebesar 86,50% belum mencapai 100%.

Apabila realisasi belanja langsung dapat ditingkatkan maka akan tercapai efektivitas belanja pemerintah daerah dimana input yang merupakan anggaran belanja pemerintah dapat menghasilkan output yang dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Efektivitas belanja pemerintah yang tercapai akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena alokasi anggaran daerah lebih diprioritaskan pada sektor-sektor yang lebih produktif. Efektivitas belanja daerah yang dikontrol oleh pemerintah daerah akan sangat mempengaruhi pertumbuhan daerah (Kharisma, 2013:112).

Namun, efektivitas belanja pemerintah daerah yang diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan dengan peningkatan belanja langsung saja, tetapi masih ada faktor lain yang dapat meningkatkan efektivitas belanja daerah sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

## **Metode Penelitian**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota seluruh Indonesia Tahun 2012-2015. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu : (1) Kabupaten dan kota yang memiliki laporan anggaran dan realisasi APBD per 31 Desember dari tahun 2012-2015. (2) Kabupaten dan kota yang memiliki laporan anggaran dan realisasi APBD menurut urusan per 31 Desember dari tahun 2012-2015. (3) Kabupaten dan kota yang memiliki peringkat Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah untuk laporan keuangan daerah tahun 2012-2015. (3) Kabupaten dan kota yang memiliki data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2012-2016. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis *partial least square* (PLS) mengikuti pola model persamaan *structural equation modeling* (SEM).

## Hasil Dan Pembahasan

### Pengujian

#### 1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

##### a. *Convergent Validity*

*Convergent validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara skor indikator dengan skor variabel latennya (*loading factor*) yang diukur dengan PLS. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan variabel laten yang akan diukur. Tetapi menurut Chin (1998), dalam penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading factor* 0,5 sampai dengan 0,60 dianggap cukup baik. Dalam penelitian ini tahap awal *convergent validity* menunjukkan bahwa dari 35 indikator hanya 22 indikator yang memenuhi syarat *convergent validity* sedangkan 13 lainnya tidak memenuhi. Oleh karena itu 13 indikator yang tidak memenuhi syarat *convergent validity* dieliminasi dan dilakukan pengukuran kembali melalui WarpPLS 6.0.

Selain itu, dalam penelitian ini untuk mengukur *convergent validity* dapat dilakukan dengan melihat hasil dari Warp PLS 6.0 pada bagian *Average Variance Extracted* (AVE). Pengukuran AVE ini menggambarkan varian atau keragaman variabel manifest yang dapat dikandung oleh variabel laten. Kriteria penilaiannya adalah nilai  $AVE > 0,5$  (Hair, *et. al*, 2011). Tabel berikut dibawah ini merupakan hasil AVE setiap variabel laten:

**Tabel 1**  
**Nilai AVE**

<i>Average Variances Esxtracted (AVE)</i>				
<b>PRIOR</b>	<b>ALOK</b>	<b>WAKTU</b>	<b>AKUNT</b>	<b>EFEKT</b>
0,935	0,766	0,652	0,670	0,693

Sumber :Hasil *output* WarpPLS 6.0 yang telah diolah (2017)

Tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai AVE untuk variabel prioritas sebesar 0,935, variabel ketepatan alokasi sebesar 0,766, variabel ketepatan waktu sebesar 0,652, variabel transparansi dan akuntabilitas sebesar 0,670, dan variabel efektivitas sebesar 0,693. Hasil dari variabel laten tersebut menunjukkan bahwa nilai AVE dari semua variabel laten yang dihasilkan lebih besar dari 0,5. Bedasarkan kriteria AVE, hasil tersebut telah menunjukkan *convergent validity* yang baik.

##### b. *Discriminant Validity*

*Discriminant validity* dinilai dari *cross loading* pengukuran dengan variabel laten. Variabel laten akan memprediksi indikatornya labih baik daripada variabel lainnya jika korelasi variabel laten dengan setiap indikator lebih besar daripada ukuran variabel lainnya. Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan adalah dengan melihat bagian *cross loading*. Berikut adalah tabel hasil *cross loading* antara setiap indikator dengan variabel latennya:

**Tabel 2**  
***Cross Loading* Indikator Antar Konstruk**

	<b>PRIOR</b>	<b>ALOK</b>	<b>WAKTU</b>	<b>AKUNT</b>	<b>EFEKT</b>
<b>A3</b>	0,907	0,004	-0,001	0,063	0,049
<b>A4</b>	0,957	-0,005	0,001	-0,043	0,011
<b>A5</b>	0,940	0,000	0,000	-0,017	-0,058
<b>B2</b>	-0,063	0,766	0,036	-0,155	0,212
<b>B3</b>	0,063	0,766	-0,036	0,155	-0,212
<b>C1</b>	-0,061	0,046	0,589	-0,127	-0,045
<b>C2</b>	-0,118	-0,055	0,703	0,130	0,046
<b>C3</b>	0,036	0,007	0,689	-0,084	-0,105
<b>C4</b>	-0,130	0,000	0,664	0,034	0,133
<b>C5</b>	0,296	0,011	0,607	0,030	-0,035

<b>D1</b>	0,515	0,039	-0,124	0,572	-0,076
<b>D2</b>	-0,068	0,058	0,030	0,713	-0,030
<b>D3</b>	-0,155	0,051	0,035	0,740	-0,022
<b>D4</b>	-0,041	0,021	0,063	0,748	0,094
<b>D5</b>	-0,183	-0,214	-0,043	0,551	0,019
<b>E1</b>	0,050	0,027	-0,117	0,128	0,698
<b>E2</b>	0,104	-0,090	-0,070	0,113	0,730
<b>E3</b>	-0,029	0,048	0,129	0,000	0,760
<b>E4</b>	-0,030	-0,059	0,007	-0,167	0,720
<b>E6</b>	0,034	-0,006	-0,002	0,173	0,667
<b>E7</b>	-0,078	-0,030	0,097	-0,153	0,728
<b>E8</b>	-0,065	0,150	-0,077	-0,109	0,516

Sumber : Hasil *output* WarpPLS 6.0 yang telah diolah (2017)

Berdasarkan hasil *output* pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa korelasi variabel prioritas dengan indikatornya lebih besar daripada korelasi indikator prioritas dengan variabel laten lainnya. Kemudian korelasi variabel ketepatan alokasi dengan indikatornya juga lebih besat daripada korelasi indikator prioritas dengan variabel laten lainnya. Lalu korelasi variabel ketepatan waktu dengan indikatornya juga menunjukkan hasil lebih besar dibandingkan dengan korelasi indikator ketepatan waktu dengan variabel laten lainnya. Sama seperti sebelumnya, korelasi variabel transparansi dan akuntabilitas dengan indikatornya menunjukkan hasil yang lebih besar daripada korelasi indikator transparansi dan akuntabilitas dengan variabel laten lainnya. Terakhir, korelasi variabel efektivitas dengan indikatornya menunjukkan hasil yang lebih besar daripada korelasi indikator efektivitas dengan variabel laten lainnya. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel laten memenuhi kriteria *discriminant validity*, dimana seluruh variabel laten memprediksi indikator mereka lebih besar dibandingkan dengan indikator lainnya.

**c. Composite Reliability**

**Tabel 3**  
*Latent Variable Coefficients*

	<b>PRIOR</b>	<b>ALOK</b>	<b>WAKTU</b>	<b>AKUNT</b>	<b>EFEKT</b>
<i>Composite Reliability</i>	0,954	0,740	0,786	0,800	0,864

Sumber : Hasil *output* Warp PLS 6.0 yang telah diolah (2017)

*Composite reliability* harus lebih besar dari 0,70 (Hair, et. al, 2011). Berdasarkan tabel diatas, hasil olah data menunjukkan *composite reliability* yang bagus dari setiap variabel laten, yaitu prioritas (0,954), ketepatan alokasi (0,740), ketepatan waktu (0,786), transparansi dan akuntabilitas (0,800) dan efektivitas (0,864). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel laten memiliki *composite reliability* yang tinggi dimana hasil setiap variabel menunjukkan lebih dari 0,70.

**2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)**

Uji *model fit* ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu model memiliki kecocokan dengan data. Pada uji *model fit* ini, terdapat 3 indeks pengujian, yaitu *average path coefficient* (APC), *average R – squared* (ARS), dan *average variances factor* (AVIF) dengan kriteria APC dan ARS diterima dengan syarat *p-value* < 0,1 dan AVIF lebih kecil dari 5. Berikut adalah hasil *output model fit indices* dari program WarpPLS 6.0.

**Tabel 4**  
**Model Fit Indices**

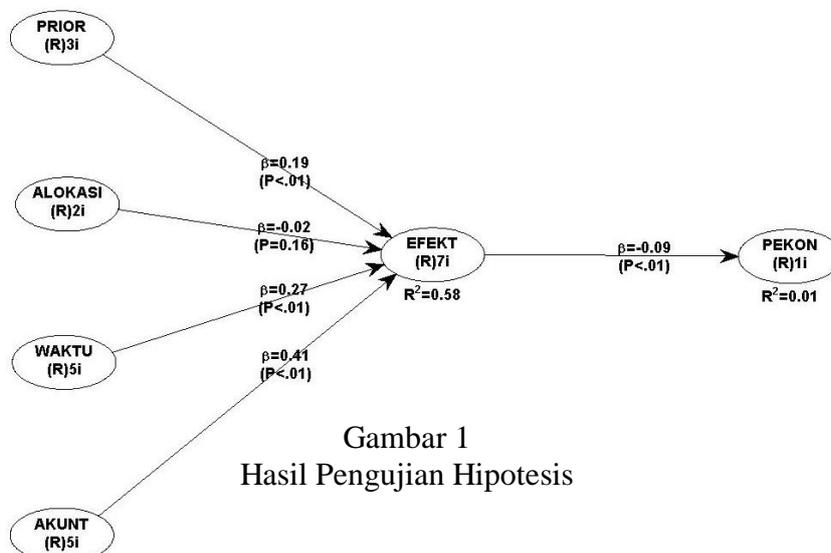
	Indeks	<i>p-value</i>
<b>APC</b>	0,198	< 0,001
<b>ARS</b>	0,293	< 0,001
<b>AVIF</b>	1,745 (acceptable if $\leq 5$ , Idealy $\leq 3,3$ )	

Sumber : Hasil *output* WarpPLS 6.0 yang telah diolah (2017)

Hasil *output* di atas menjelaskan bahwa APC memiliki indeks sebesar 0,198 dengan nilai *p-value* < 0,001. Sedangkan ARS memiliki indeks sebesar 0,293 dengan *p-value* < 0,001. *P-value* kedua indeks menunjukkan hasil dibawah 0,05 yang berarti memenuhi kriteria APC dan ARS. AVIF juga menunjukkan indeks sebesar 1,745 yang berarti diterima karena indeks dibawah 5 dan ideal karena dibawah 3,3 maka model tidak mengandung multikolinearitas. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini dapat memenuhi kriteria dan bisa digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap varabel dependen.

### Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan WarpPLS 6.0 ditunjukkan pada Gambar berikut:



**Gambar 1**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Pengujian seluruh hipotesis akan dianalisis berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan data pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil pengujian hipotesis**

Hipotesis	Hubungan Variabel	Koefisien Jalur	<i>P-value</i>	Prediksi	Temuan
H1	PRIOR -> EFEKT	0,191	<0,001	Berpengaruh	Berpengaruh
H2	ALOK -> EFEKT	-0,023	0,163	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
H3	WAKTU -> EFEKT	0,267	<0,001	Berpengaruh	Berpengaruh
H4	AKUNT -> EFEKT	0,414	<0,001	Berpengaruh	Berpengaruh
H5	EFEKT -> PEKON	-0,094	<0,001	Berpengaruh	Berpengaruh

Sumber : Hasil *output* WarpPLS 6.0 yang telah diolah (2017)

### **3. Pembahasan**

#### **Prioritas berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah**

Berdasarkan hasil pengujian WarpPLS 6.0 pada tabel di atas diketahui bahwa prioritas berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai *path coefficient* sebesar 0,191 dengan *p-value* < 0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang pertama (H1) dimana prioritas berpengaruh terhadap belanja daerah diterima. Artinya, kenaikan 1 nilai prioritas akan berpengaruh terhadap efektivitas belanja sebesar 19,1%. Prioritas belanja setiap daerah berbeda-beda, untuk menentukan prioritas belanja masing-masing daerah memiliki standar pelayanan minimum sendiri agar program yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Dalam pedoman penyusunan APBD yang dibuat oleh pemerintah pusat memuat kebijakan agar prioritas pemerintah sinkron terhadap prioritas nasional sesuai tahun anggaran yang berlaku. Sehingga nantinya meskipun prioritas yang dilaksanakan oleh daerah berbeda tetapi tetap sejalan dengan pemerintah pusat. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap daerah kabupaten telah melaksanakan program prioritas sejalan dengan prioritas nasional. Dengan adanya prioritas ini maka pemerintah daerah dapat membelanjakan anggaran secara efektif sesuai dengan prioritas daerah yang telah disusun tersebut.

#### **Ketepatan Alokasi berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah**

Berdasarkan hasil pengujian WarpPLS 6.0 pada tabel di atas diketahui bahwa ketepatan alokasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai *path coefficient* sebesar -0,023 dengan *p-value* 0,163, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ketepatan alokasi berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah ditolak. Dalam penelitian ini ketepatan alokasi tidak dapat berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah dikarenakan perbedaan karakteristik daerah dalam menggunakan anggaran. Jumlah realisasi anggaran berbeda-beda untuk setiap kabupaten dan kota sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Dari 12 indikator untuk variabel ketepatan alokasi hanya 2 yang memenuhi konvergen validitas sehingga dari 2 indikator tersebut belum bisa mencerminkan atau menggambarkan variabel ketepatan alokasi, sehingga dalam penelitian ini, variabel ketepatan alokasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah.

#### **Ketepatan waktu berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah**

Berdasarkan hasil pengujian WarpPLS 6.0 pada tabel di atas diketahui bahwa ketepatan waktu berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai *path coefficient* sebesar 0,267 dengan *p-value* < 0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) yaitu ketepatan waktu berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah diterima. Artinya, setiap kenaikan 1 nilai ketepatan waktu akan berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah sebesar 26,7%. Ketepatan waktu dalam penelitian diukur dari ketepatan waktu penetapan perda APBD, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan pemerintah daerah (LPPD), keberadaan perda tentang standar pelayanan publik dan standar prosedur operasional. Ketepatan waktu penetapan perda APBD telah diatur dalam undang-undang yang berlaku begitu pula dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan penyampaian laporan pelaksanaan pemerintah, ini berarti dengan ketepatan waktu penetapan perda APBD maka anggaran yang dibelanjakan akan sesuai dengan waktu pelaksanaan program prioritas sehingga mengurangi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak pasti, sehingga anggaran yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah dapat digunakan secara efektif.

#### **Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah**

Dari hasil pengujian WarpPLS 6.0 pada tabel di atas dapat diketahui bahwa transparansi berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai *path*

*coefficient* sebesar 0,414 dengan  $p\text{-value} < 0,001$  sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah diterima. Artinya setiap kenaikan 1 nilai transparansi dan akuntabilitas akan berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah sebesar 41,4%. Transparansi merupakan keterbukaan informasi dan informasi tersebut dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut, sedangkan akuntabilitas berarti anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini setiap daerah kabupaten dan kota telah melaksanakan transparansi dan akuntabilitas. Melaksanakan proses transparansi yaitu dengan menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat mengenai proses penetapan anggaran dan pembelanjaan anggaran pemerintah daerah, sedangkan pelaksanaan akuntabilitas yaitu anggaran yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dengan adanya transparansi maka dapat membantu mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas (Max H. Pohan). Oleh karena itu dalam penelitian ini transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah.

#### **Efektivitas belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi**

Dari hasil pengujian WarpPLS 6.0 pada tabel diatas dapat diketahui bahwa transparansi berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai *path coefficient* sebesar -0,094 dengan  $p\text{-value} < 0,001$  sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H5) efektivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi diterima. Efektivitas belanja daerah sangat penting karena mencerminkan efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaan anggaran yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Anggaran pemerintah daerah yang digunakan dengan sebaik mungkin akan dapat memberikan hasil yang baik untuk kepentingan masyarakat sehingga daya beli masyarakat semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi pun meningkat.

#### **Simpulan**

Prioritas belanja berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas dapat mempengaruhi efektivitas belanja daerah, karena dengan perencanaan yang tepat maka pemerintah dapat membelanjakan anggaran sesuai dengan tujuan utamanya sehingga anggaran yang digunakan untuk belanja menjadi lebih efektif. Prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah juga sejalan dengan prioritas nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Ketepatan alokasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah. Dalam penelitian ini ketepatan alokasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah dikarenakan perbedaan karakteristik daerah dalam menggunakan anggaran. Jumlah realisasi anggaran berbeda-beda untuk setiap daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Ketepatan waktu berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu dapat mempengaruhi efektivitas belanja daerah, karena ketepatan waktu sangat penting dalam melaksanakan prioritas yang menjadi tujuan utama pemerintah daerah. Ketepatan waktu penetapan perda APBD telah diatur dalam undang-undang yang berlaku begitu pula dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan penyampaian laporan pelaksanaan pemerintah, ini berarti dengan ketepatan waktu penetapan perda APBD maka anggaran yang dibelanjakan akan sesuai dengan waktu pelaksanaan program prioritas sehingga mengurangi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak pasti, sehingga anggaran yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah dapat digunakan secara efektif.

Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dapat mempengaruhi efektivitas belanja daerah karena penggunaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan mencerminkan anggaran yang dibelanjakan secara efektif.

Efektivitas belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah yang efektif dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi meskipun efektivitas belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam penelitian ini efektivitas belanja daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan keadaan Indonesia dimana anggaran pemerintah setiap tahunnya meningkat tetapi keadaan pertumbuhan ekonomi menurun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

### **Daftar Pustaka**

- Armin, Rahmansyah. 2004. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi-propinsi di Indonesia*. Magister Ekonomi Pembangunan. USU Medan.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta
- Badrudin, Rudi. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah Edisi 2*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Erryana, V. dan Setyawan, H. 2016. Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol. 5, No. 1. Hal. 1-14
- Herwastoeti. 2010. Konsep Desentralisasi Fiskal Terhadap Otonomi Daerah. *Humanity*. Vol. 5, No. 2. Hal. 100-108
- Juanda, B. dan Heriwibowo, D. 2016. Konsolidasi Desentralisasi Fiskal melalui Reformasi Kebijakan Belanja Daerah Berkualitas. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. Vol. 7, No. 1. Hal. 15-28
- Kharisma, B. 2013. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol. 14, No. 2. Hal. 101-119
- Nurana, A. C. dan Muta'ali, L. 2012. *Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Ketimpangan Perkembangan Wilayah di Kawasan*
- Makka, H. A., dkk. 2015. Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kotamobagu. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 15, No. 4. Hal. 324-333
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Munandar, A. 2016. Analisis Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi dan Net Ekspor Provinsi di Indonesia. *Journal Ecoment Global*. Vo. 1, No. 1. Hal. 21-49
- Nurcholis, H. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo

- Nurhemi dan Suryani, G. 2015. Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Vol. 18, No. 2. Hal. 183-205
- Octariani, D., dkk. 2017. Anggaran Berbasis Kinerja, Sumber Daya Manusia, dan Kualitas Anggaran SKPD. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 2, No. 1. Hal. 27-41
- Pratolo, S. dan Yudha, B. S. 2012. Peran Faktor-faktor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. 12, No. 2. Hal. 144-160
- Pohan, Max H. 2000. Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah. Sekayu. Seminar Musyawarah Besar Pembangunan Musi Banyuasin Ketiga
- Sukirno, S. 2012. *Makroekonomi: Teori Pengantar, Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers
- Supartoyo, Y. H., dkk. 2013. The Economic Growth and The Regional Characteristics: The Case of Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Juli 2013. Hal. 1-17
- Todaro, M. P. dan Stephen, S. 2003. *Economic Development, Eighth Edition*. United Kingdom: Pearson Education Limited
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- \_\_\_\_\_, 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- \_\_\_\_\_, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.